

Pembangunan Berbasis Kebebasan Amartya Sen: Konsep dan Implikasi Terhadap Pembangunan Di Indonesia

Shidiq Gumelar¹, Subaidi Qomar²

^{1,2} *Interdisciplinary Islamic Studies*, UIN Sunan Kalijaga, Indonesia
Surat-e: shidiqgumelar1@gmail.com

ABSTRACT

In the last decade, development in Indonesia has predominantly focused on physical infrastructure, with primary priorities given to toll roads, bridges, and buildings. The main goal of this physical development is to boost economic growth in the areas being developed. This aligns with the conventional development paradigm, which measures the success of development solely based on economic growth. However, this conventional paradigm, which centers on economic growth, often overlooks other important aspects, resulting in new problems such as social inequality, environmental damage, and even social conflicts. In contemporary development discourse, a more comprehensive concept has emerged, namely development based on freedom, as proposed by Amartya Sen. It is within this context that this study aims to analyze the concept of development articulated by Amartya Sen and its implications for the implementation of development in Indonesia. According to Sen, development should not be viewed merely as an economic increase but as the expansion of human freedoms, which include political freedom, economic facilities, social opportunities, guarantees of transparency, and protection. Based on the analysis, this article suggests that in order to create more inclusive and sustainable development, the government must ensure greater participation from the public, respect their rights to express opinions and participate, and incorporate the principles of freedom at every stage of planning and implementing development.

ABSTRAK

Pembangunan di Indonesia dalam dasawarsa terakhir cenderung berpusat pada pembangunan fisik, dengan prioritas utama pada infrastruktur seperti jalan tol, jembatan, dan gedung-gedung. Tujuan utama pembangunan fisik ini adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada wilayah yang dibangun. Hal ini sejalan dengan paradigma pembangunan konvensional yang mengukur keberhasilan pembangunan semata-mata berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Namun, paradigma pembangunan konvensional yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi seringkali mengabaikan aspek-aspek penting lainnya. Sehingga menciptakan persoalan baru seperti ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan bahkan konflik sosial. Dalam wacana pembangunan kontemporer hadir konsep yang lebih komprehensif dalam memaknai pembangunan, yakni pembangunan berbasis kebebasan yang dikemukakan oleh Amartya Sen. Dalam konteks inilah penelitian ini hadir untuk menganalisis konsep pembangunan yang dikemukakan oleh Amartya Sen dan implikasinya terhadap pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Menurut Sen, pembangunan bukan hanya dilihat sebagai peningkatan ekonomi, tetapi lebih sebagai perluasan kebebasan manusia, yang mencakup kebebasan politik, fasilitas ekonomi,

KEYWORDS:

Amartya Sen, Freedom, Development.

KATA KUNCI:

Amartya Sen, Kebebasan, Pembangunan.

How to Cite:

“Gumelar, S., & Qomar, S. (2025). Pembangunan Berbasis Kebebasan Amartya Sen: Konsep dan Implikasi Terhadap Pembangunan Di Indonesia. *NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, 2(2), 260–269.”

kesempatan sosial, jaminan keterbukaan dan perlindungan. Berdasarkan hasil analisis, artikel ini menyarankan bahwa untuk menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, pemerintah perlu memastikan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat, menghormati hak-hak mereka untuk berpendapat dan berpartisipasi, serta melibatkan prinsip-prinsip kebebasan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

PENDAHULUAN

Istilah pembangunan barangkali menjadi istilah yang sering didengar oleh masyarakat Indonesia. Kata ini sering kita dengar dalam berbagai konteks, mulai dari pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan dan gedung, hingga nama sebuah instansi pemerintah seperti Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). Namun, istilah pembangunan tentu tidak hanya sebatas “bangunan” atau proyek-proyek fisik, ia tentu memiliki makna yang jauh lebih luas dari itu. Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Perubahan ini bisa mencakup berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial sampai lingkungan.

Pembangunan dan kebijakan publik adalah dua konsep yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Kebijakan publik adalah instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan. Dalam konteks Indonesia, agenda-agenda pembangunan biasanya dirumuskan dalam suatu dokumen yang disebut sebagai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk skala nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk skala regional. Dalam arti ini pembangunan menjadi semacam alat kepentingan bagi rezim pemerintahan yang berkuasa (*ideology of developmentalism*). Sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, RPJPN seharusnya dapat menjadi pedoman yang komprehensif untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, pada praktiknya seringkali kebijakan yang dirumuskan lebih berorientasi pada aspek ekonomi semata dan mengabaikan dimensi sosial, budaya dan juga lingkungan yang pada akhirnya menambah persoalan baru seperti kerusakan lingkungan, ketidaksetaraan dan konflik sosial. Hal demikian adalah konsekuensi logis dari penggunaan indikator ekonomi, seperti Produk Domestik Bruto dan Produk Nasional Bruto atau pendapatan per kapita, sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan.

Dalam dasawarsa terakhir pembangunan di Indonesia lebih diwarnai dengan pembangunan dalam aspek fisik. Banyak anggaran digelontorkan oleh pemerintah Indonesia untuk membangun infrastruktur, seperti jalan tol, bandara, pelabuhan sampai mega proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Ruhlessin, 2023). Dalam konteks ini, pembangunan menciptakan suatu paradoks, di satu sisi bertujuan untuk mempermudah distribusi barang dan jasa, meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, di lain sisi pembiayaan infrastruktur seringkali bergantung pada utang luar negeri, yang menambah beban fiskal. Pembangunan infrastruktur itu tentu saja adalah iktikad baik yang patut diapresiasi, namun perlu diingat bahwa pembangunan tidak hanya terbatas pada aspek fisik semata. Pembangunan fisik yang pesat tanpa diimbangi dengan pembangunan manusia dapat menciptakan ketimpangan dan permasalahan sosial. Dari segi ketimpangan, banyak daerah di Indonesia yang masih tertinggal dalam hal akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Selain itu, pembangunan yang semata-mata mengedepankan aspek ekonomi juga dapat berpotensi menimbulkan konflik sosial, seperti yang terjadi pada konflik di Wadas, Jawa Tengah dan Rempang, Batam. Oleh karena itu, perlu adanya pergeseran paradigma pembangunan dari yang berpusat pada pertumbuhan ekonomi semata menuju pembangunan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, salah satunya adalah konsep yang ditawarkan oleh Amartya Sen.

Kecenderungan pembangunan yang terlalu menekankan aspek pertumbuhan angka ekonomi dan pembangunan infrastruktur menjadi kritik utama Amartya Sen. Ia adalah tokoh *developmentalism* yang menawarkan perspektif baru dalam memandang pembangunan. Ekonom dan filsuf yang berasal dari India ini melalui bukunya *Development as Freedom* merumuskan kembali pengertian yang menyeluruh tentang

pembangunan. Dalam pandangannya, berbagai kondisi seperti kekurangan pangan, buta huruf, kelaparan, tiada kebebasan sipil dan hak-hak berdemokrasi serta berbagai bentuk perampasan hak-hak milik (*entitlement*) pribadi adalah bentuk-bentuk kemiskinan yang menciptakan penderitaan. Amartya Sen merumuskan definisi baru pembangunan sebagai kebebasan (*development as Freedom*) (Maryolo, 2018). Melalui konsep ini Amartya Sen memandang bahwa pembangunan sejatinya bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi semata, tetapi tentang perluasan kebebasan dan kapabilitas manusia. Dengan pandangan ini, ia mendorong agar pembangunan tidak serta merta hanya melihat dimensi kesejahteraan saja, tetapi juga kebebasan manusia untuk berpendapat, berpolitik dan berserikat.

Pemikiran Amartya Sen memberikan perspektif yang segar dan komprehensif dalam memahami pembangunan. Konsep “pembangunan sebagai kebebasan” yang ia tawarkan semakin memiliki relevansinya di tengah kompleksitas permasalahan yang diakibatkan oleh pendekatan pembangunan konvensional, seperti kemiskinan menahun, konflik sosial dan kerusakan lingkungan. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mencoba untuk mengkaji dan mengelaborasi lebih dalam **bagaimana konsep kebebasan Amartya Sen serta implikasinya terhadap pembangunan di Indonesia?**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat studi literatur (*library research*) yang memadukan kajian teoritis dari karya-karya Amartya Sen dengan analisis kebijakan pembangunan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis serta menggunakan teknik deskriptif-analitis. Pendekatan ini digunakan dengan tujuan untuk memahami konsep pembangunan berbasis kebebasan yang diajukan oleh Amartya Sen dan mengeksplorasi implikasinya terhadap pembangunan di Indonesia melalui analisis data yang bersifat teoritis dan empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar belakang paradigma pembangunan kebebasan

Secara garis besar, ada dua pandangan terkait pemaknaan istilah “pembangunan”. Pandangan pertama adalah pandangan umum atau kebanyakan masyarakat yang memandang pembangunan sebagai suatu kata benda netral dan bertujuan untuk menjelaskan proses dan usaha dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik dari segi ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat dan sebagainya. Dengan pemahaman seperti itu, ‘pembangunan’ sering kali diidentikkan dengan kata “perubahan sosial”. Dalam arti ini, perubahan sosial dianggap merupakan hasil langsung dari proses pembangunan. Bagi penganut pandangan ini konsep pembangunan dianggap berdiri sendiri sehingga membutuhkan kata sifat tambahan, seperti “kapitalisme” sehingga menjadi pembangunan model kapitalisme, “sosialisme” menjadi pembangunan sosialisme, ataupun “Indonesia” menjadi pembangunan model Indonesia. Dalam pengertian seperti ini konsep pembangunan berarti teori sosial ekonomi yang sangat umum. Pandangan ini menjadi pandangan yang mendominasi dalam diskursus mengenai perubahan sosial.

Sementara itu, pandangan kedua adalah kelompok yang mengasumsikan bahwa kata pembangunan itu merupakan sebuah diskursus, suatu pendirian atau suatu paham, bahkan ada yang menyatakan bahwa pembangunan merupakan suatu ideologi dan teori tertentu tentang perubahan sosial. Dalam pandangan yang disebut terakhir ini konsep pembangunan dianggap bukanlah kata yang bersifat netral. Dengan demikian, pembangunan dalam pandangan kedua ini tidak diartikan sebagai kata benda belaka, tetapi sebagai suatu “aliran”, keyakinan ideologis dan teoritis serta praktik mengenai perubahan sosial. Bersamaan dengan teori pembangunan terdapat teori-teori perubahan sosial lainnya seperti sosialisme dan dependensia. Oleh karena itu banyak yang menamakan teori pembangunan sebagai pembangunanisme (*developmentalism*) (Fakih, 2002).

Dalam kerangka pembangunan sebagai suatu teori tersendiri itu, dewasa ini muncul kecenderungan memberikan perhatian yang sangat besar terhadap berbagai aspek mengenai pembangunan di negara-negara berkembang. Dalam kajian pembangunan, perhatian itu kemudian mewujud dalam teori pembangunan dunia ketiga. Istilah dunia ketiga secara historis diberikan untuk negara-negara yang tidak termasuk ke dalam kedua blok yang berperang pada saat perang dingin berlangsung, yakni Dunia Pertama (blok kapitalis) dan Dunia Kedua (blok sosialis). Dalam perkembangannya, istilah Dunia Ketiga lebih diartikan sebagai negara-negara yang secara ekonomi miskin atau negara-negara yang sedang berkembang. Sehingga yang dimaksud dengan teori Pembangunan Dunia Ketiga adalah teori pembangunan yang berusaha untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh negara-negara miskin atau negara-negara yang sedang berkembang, dalam sebuah tatanan dunia yang didominasi oleh kekuatan ekonomi, ilmu pengetahuan dan militer negara-negara adikuasa atau negara-negara industri maju (Budiman, 2000).

Ada beberapa aliran utama dalam teori pembangunan dunia ketiga. Kelompok pertama adalah kelompok Teori Modernisasi yang mengutamakan faktor manusia dan nilai-nilai budayanya sebagai persoalan pokok dalam pembangunan. Teori modernisasi ini menjadi teori yang dominan digunakan dalam mengkaji masalah pembangunan di Indonesia. Secara teoritis, modernisasi ini dianut oleh kalangan ahli ilmu sosial (termasuk ahli ilmu ekonomi), dan juga oleh para pejabat tinggi negara di Indonesia. Kedua adalah kelompok Teori Ketergantungan atau Depedensi. Teori ini merupakan reaksi terhadap teori modernisasi yang dianggap tidak mencukupi, bahkan dianggap menyesatkan. Teori yang lahir dari kalangan ahli ilmu sosial di Amerika Latin ini mengkritisi eksploitasi yang dilakukan oleh negara maju kepada negara-negara Dunia Ketiga. Pengaruhnya kemudian menyebar hingga ke Amerika Serikat, Eropa dan akhirnya Asia. Kelompok yang terakhir adalah kelompok Teori Pasca Ketergantungan. Teori-teori yang berada dalam kelompok ini pada dasarnya merupakan alternatif untuk menyempurnakan apa yang kurang pada Teori Ketergantungan.

Pada perkembangan selanjutnya, muncul spektrum yang lebih luas tentang pembangunan alternatif. Salah satu yang mengemuka dalam diskursus pembangunan kontemporer adalah pembangunan sebagai kebebasan yang dikemukakan oleh Amartya Sen. Ia menganalisis secara tajam konsep pembangunan yang diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi semata. Konsep pembangunan yang sudah ada itu mengatakan bahwa suatu negara dapat dikatakan berhasil melakukan pembangunan, jika pertumbuhan ekonomi masyarakatnya cukup tinggi. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut dapat diukur dari tingkat produktivitas negara tersebut setiap tahunnya. Secara ekonomi ukuran produktivitas ini menggunakan Produk Nasional Bruto atau *Gross National Product* (GNP) dan Produk Domestik Bruto atau *Gross Domestic Product* (GDP) (Hasan & Azis, 2018). Konsep pembangunan seperti inilah yang menjadi kritik utama Amartya Sen yang kemudian mengembangkan teori pendekatan kapabilitas (*capability approach*).

Konsep dasar pembangunan sebagai kebebasan amartya sen

Pertumbuhan angka-angka ekonomi sering kali dijadikan acuan sebagai keberhasilan pembangunan suatu negara. Meski berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terkadang pembangunan konvensional gagal dalam aspek sosial dan lingkungan sehingga selalu menyisakan persoalan-persoalan baru. Emil Salim (2010: 22) menyatakan bahwa permasalahan itu muncul disebabkan karena pembangunan konvensional selalu menempatkan ekonomi pada pusat persoalan pertumbuhan dan meletakkan faktor sosial dan lingkungan itu pada posisi yang kurang penting. Selain itu, pertumbuhan ekonomi dewasa ini terkendala oleh kondisi sosial masyarakat yang masih terbelakang, sesuatu yang menyebabkan ketidakstabilan di dalam negara dan antar negara. Kondisi demikian memerlukan konsep-konsep baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Salah satu solusi alternatif adalah teori kapabilitas yang dikemukakan oleh Amartya Sen. Dalam pandangan ekonom asal Bengal ini pembangunan bukan hanya pertumbuhan angka-angka ekonomi semata, pembangunan sejati adalah saat setiap individu memiliki kebebasan untuk mencapai sesuatu yang mereka pilih dan mereka nilai berharga. Kebebasan untuk mencapai sesuatu itu dalam perspektif Amartya Sen disebut sebagai kapabilitas.

Konsep kebebasan dalam perspektif Sen dibagi menjadi dua Aspek, yaitu aspek proses dan aspek kesempatan (Sen, 2009). Pandangan Sen mengenai dua aspek kebebasan ini pada hakikatnya adalah satu-kesatuan. Namun, hal yang ditekankan dalam dua aspek ini berbeda. Aspek proses lebih menekankan absennya paksaan dari luar, sementara aspek kemampuan lebih menekankan sisi kemampuan untuk mencapai (*The Ability to achieve*). Dengan demikian, maka definisi kebebasan yang diajukan oleh Sen dalam aspek proses dapat dimaknai sebagai kebebasan yang memerhatikan proses memilih atau menentukan keputusan. Dalam arti ini selama seseorang dalam menentukan keputusan yang ia anggap baik dan bernilai tidak mendapatkan paksaan oleh pihak lain maka dalam pandangan Sen disebut sebagai kebebasan dalam aspek proses.

Interpretasi kebebasan dalam aspek proses yang dikembangkan oleh Sen ini pada arti tertentu memiliki kesinambungan dengan pandangan kaum libertarian. Hampir sebagian besar gagasan libertarianisme (atau, “Liberalisme Klasik” merujuk pada istilah yang digunakan oleh Mises) tentang hak individu dapat dirujuk sebagai pondasi pemikiran kebebasan Sen dalam aspek proses. Hak individu diartikan oleh libertarianisme sebagai hak negatif, di mana hak individu dilihat sebagai hak atas keterbebasan dari paksaan yang dilakukan oleh entitas di luar individu tersebut, baik itu dari pemerintah, institusi keagamaan, keluarga maupun kelompok mayoritas masyarakat (Kurniawan & Mahaganti, 2019). Dalam pandangan salah satu tokoh libertarian, Isaiah Berlin mendefinisikan hak negatif itu sebagai kebebasan negatif, yakni ketiadaan paksaan (Sunaryo, 2017).

Meskipun demikian, kebebasan tidak cukup jika hanya dipahami sebatas ketiadaan paksaan, seseorang perlu kemampuan untuk meraih (*the ability to achieve*) sesuatu yang bernilai baginya. Pengertian ini dalam perspektif Sen juga merupakan bagian dari kebebasan, yakni bagian dari kebebasan dalam aspek kesempatan (*opportunity*). Dalam pandangan Sen, kebebasan yang lebih besar akan memberikan kesempatan yang lebih besar pula untuk mencapai tujuan-tujuan yang dianggap bernilai. Ia menyebut aspek kebebasan ini sebagai kebebasan yang memerhatikan kemampuan aktual seseorang untuk mencapai sesuatu yang sudah dipertimbangkan nilainya. Sen sering kali menyebut kebebasan dalam aspek kesempatan ini dengan kebebasan substantif atau kapabilitas (Sunaryo, 2017).

Sebagaimana telah disinggung diawal, Sen memandang dua aspek kebebasan ini tidak dapat dipisahkan saat memahami makna kebebasan. Pengertian pada dua aspek kebebasan ini adalah langkah moderat di antara dua kutub kebebasan, yakni kelompok libertarian yang terlalu menitikberatkan aspek prosedur dan kelompok konsekuensialis yang terlalu mengutamakan hasil. Secara sederhana, dua konsep kebebasan Sen ini dapat digambarkan dalam ilustrasi seorang pemeluk agama. Seseorang memiliki kebebasan formal untuk memilih agamanya, ini adalah kebebasan dalam aspek proses, yaitu kebebasan dari campur tangan pihak lain dalam memilih keyakinan. Namun, kebebasan ini akan menjadi tidak berarti jika individu tersebut tidak memiliki kemampuan/kapabilitas untuk menjalankan agamanya (aspek kebebasan kesempatan real/kapabilitas). Kapabilitas ini dapat berupa akses ke tempat ibadah, komunitas agama atau sumber-sumber daya ekonomi untuk menjalankan ritual-ritual agama.

Gambaran lebih utuh mengenai pentingnya dua aspek kebebasan sebagai satu-kesatuan ini juga dapat dilihat dari ilustrasi yang ditampilkan Sen dalam bukunya berjudul *The Idea of Justice*. Ilustrasi ini menceritakan tentang tiga skenario seseorang yang berencana menghabiskan waktunya di rumah saat akhir pekan. Berikut adalah gambarannya:

Tabel 1. Kebebasan sebagai Satu-kesatuan

Skenario	Kebebasan Proses	Kebebasan Kesempatan	Penjelasan
Skenario 1	Maksimal (tidak ada pembatasan eksternal)	Maksimal (memiliki kemampuan untuk merealisasikan rencana)	Si A memiliki kebebasan penuh untuk memilih dan merealisasikan rencananya tanpa hambatan apapun.

Skenario 2	Hilang (dipaksa keluar rumah oleh ancaman)	Hilang (tidak dapat mewujudkan rencana)	Si A berencana tinggal di rumah, namun dihadapkan dengan ancaman dari penjahat yang memaksanya keluar. Kebebasan hilang baik dari segi proses maupun kesempatan.
Skenario 3	Hilang (terjadi paksaan dari pihak eksternal untuk tetap tinggal di rumah)	Maksimal (masih dapat tinggal di rumah sesuai rencana)	Si A dipaksa untuk tinggal di rumah oleh ancaman penjahat, meskipun ia dapat merealisasikan rencananya, tetapi ini terjadi karena paksaan, yang mengurangi kebebasan proses

Kapabilitas menjadi ide sentral dari seluruh pemikiran Amartya Sen. Sunaryo (2017: 69) berpendapat bahwa latar belakang perumusan ide kapabilitas Sen dapat dilihat pada tiga hal, yang pertama pada refleksi mendalam Sen terhadap berbagai bentuk ketidakmampuan atau deprivasi yang dialami manusia, yang kedua pada tolok ukur kualitas hidup manusia dan kritiknya terhadap paham welfarisme dan yang ketiga berangkat dari kritik Sen atas konsep hal-hal pokok (*primary goods*) John Rawls. Berangkat dari evaluasinya terhadap tiga konsep ini, pada tahun 1980, Sen menawarkan konsep yang lebih segar dengan apa yang disebutnya dengan pendekatan kapabilitas sebagai alternatif baru terhadap paham utilitarianisme dan paham kesejahteraan Rawlesian (Juliawan, 2012).

Sesuatu hal yang baru dari ide kebebasan Amartya Sen adalah gagasannya mengenai kapabilitas. Ia mengklasifikasikan kapabilitas menjadi dua bagian, yakni kebebasan kesejahteraan (*well-being freedom*) dan kebebasan kepelakuan (*agency freedom*). Dengan kata lain, kemampuan seseorang untuk mencapai sesuatu yang dianggap bernilai dapat dibagi menjadi dua, yakni kapabilitas untuk mencapai kesejahteraan dan kapabilitas untuk mencapai kepelakuan. Gagasan mengenai kebebasan kepelakuan merupakan kritik Sen terhadap pandangan mapan mengenai teori pilihan rasional yang biasa dipahami sebagai maksimalisasi kepentingan diri (*self interest*). Ia berpandangan bahwa tindakan manusia tidak hanya didorong oleh motif kesejahteraan atau yang terkait dengan kepentingan diri, pandangan ini jelas berbeda dengan pandangan ekonomi arus utama yang menyatakan bahwa tindakan seseorang dapat dikatakan rasional jika tindakan itu dapat memaksimalkan kepentingan diri.

Sen mengartikan kebebasan kesejahteraan sebagai kebebasan untuk mencapai sesuatu yang menentukan kesejahteraan seseorang. Kesejahteraan itu merujuk pada seluruh manfaat dan keuntungan yang bisa dinikmati oleh seseorang. Manusia dalam konsep kebebasan kesejahteraan ini disebut sebagai penerima manfaat (*beneficiary*). Dengan pengertian ini, yang dimaksud dengan kebebasan kesejahteraan adalah kapabilitas seseorang untuk mencapai hidup yang sejahtera. Dalam konteks kebebasan kesejahteraan, Sen membedakan konsep ini dengan dua konsep yang lain, yakni capaian kesejahteraan dan sarana menuju kebebasan. Sunaryo (2017: 105) menjelaskan bahwa perbedaan ketiga konsep ini bagi Sen menjadi penting karena memiliki pengertian dan konsekuensi yang berbeda.

Pada konsep yang pertama, kebebasan kesejahteraan, maknanya telah dijelaskan di atas sebagai bagian dari pengertian kapabilitas. Sementara pada konsep yang kedua, capaian kesejahteraan dimaknai sebagai *functionings* atau capaian aktual (*actual achievement*). Capaian aktual ini dapat dipahami dalam arti kondisi (*beings*) atau aktivitas (*doings*) (Pramono, 2020). Hal yang termasuk ke dalam kategori kondisi misalnya seperti kecukupan nutrisi, berbadan sehat hingga kesejahteraan yang lebih kompleks seperti kondisi bahagia, kehormatan dan keterlibatan dalam komunitas. Sementara hal yang dihitung sebagai aktivitas seperti berjalan, melihat, makan, dan seterusnya. Dalam pandangan Sen, sebagaimana dikutip Sunaryo (2017: 107) pengertian

capaian aktual dalam konteks kesejahteraan diukur dari sejauh mana aspek kesejahteraan seseorang itu dapat “berfungsi” dalam arti yang luas.

Agar dapat memperjelas perbedaan antara capaian aktual dengan konsep kapabilitas, Sen kerap memberikan ilustrasi mengenai perbedaan keduanya dalam karya berjudul *Commodities and Capabilities*. Perbedaan itu digambarkan dalam kondisi dua orang yang memiliki pendapatan yang sama, namun yang satu dalam kondisi sakit atau cacat sedangkan yang lain dalam keadaan normal atau sehat. Dalam pandangannya, meskipun keduanya memiliki pendapatan sama, kondisi yang berbeda telah membuat kapabilitas mereka berbeda pula. Orang yang sakit atau cacat bisa menghabiskan pendapatan yang dimilikinya untuk biaya pengobatan atau menopang kebutuhan yang diakibatkan kondisi cacatnya, sementara orang kedua akan menggunakan pendapatannya tidak sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang sakit atau cacat tersebut. Dengan demikian, walaupun dua orang ini memiliki penghasilan yang sama, kapabilitas yang dimiliki keduanya bisa berbeda. Hal ini dikarenakan kemampuan untuk mengubah apa yang dimiliki menjadi capaian tidak hanya ditentukan oleh uang, tetapi multifaktor seperti kondisi kesehatan, ukuran tubuh, umur, jenis kelamin, hamil atau tidak hamil, kondisi alam, akses terhadap layanan kesehatan dan lain-lain.

Hal yang juga berbeda dari konsep kapabilitas adalah konsep sarana menuju kebebasan. Konsep ini terkait dengan konsep hal-hal pokok yang diajukan oleh John Rawls dan pandangan Ronald Dworkin mengenai *resources* atau sumber daya. Menurut Sen, hal-hal pokok dan juga sumber daya tentu saja penting, namun hal itu tidak bisa menjadi ukuran dalam melihat kualitas hidup seseorang. Dalam ilustrasinya, Sen kerap menyamakan ilustrasi capaian aktual dengan sarana menuju kebebasan, yakni tentang kekayaan dan pendapatan. Sebagaimana telah digambarkan di atas, dua orang yang memiliki kekayaan yang sama bisa saja memiliki kapabilitas yang berbeda. Kekayaan dan pendapatan bukanlah faktor utama dalam melihat kemampuan seseorang. Dalam interpretasi Sen, hal-hal pokok dan sumber daya lebih dipahami sebagai sarana menuju kebebasan, bukan kebebasan itu sendiri.

Hal yang juga menjadi pokok pemikiran Amartya Sen adalah konsep mengenai kebebasan kepelakuan. Sen sebagaimana dikutip oleh Sunaryo (2017: 111) mendefinisikan kebebasan kesejahteraan sebagai kebebasan seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu yang bernilai atau penting baginya. Konsep kebebasan kepelakuan memiliki ruang yang lebih luas daripada kebebasan kesejahteraan, karena pada konsep kepelakuan manusia dipandu oleh seluruh (totalitas) tujuannya. Dalam kerangka konsep kepelakuan, manusia tidak hanya terikat pada satu tujuan, melainkan pada banyak tujuan. Oleh karena itu, pada konsep ini manusia tidak bisa dilihat hanya pada satu motif, berbeda dengan kerangka kebebasan kesejahteraan yang melihat manusia hanya pada satu motif pada upaya mengejar manfaat maksimalisasi diri (*beneficiary*).

Melalui konsep kepelakuan, Sen hendak menegaskan adanya pluralitas nilai dan motif dalam tindakan. Hal yang dianggap bernilai oleh seseorang bukan hanya aspek kesejahteraan atau manfaat (utilitas). Dalam pandangan Sen, maksimalisasi keuntungan bukan satu-satunya motif tindakan manusia. Pandangan ini merupakan kritiknya terhadap teori ekonomi *mainstream*, utamanya gagasan yang dikemukakan oleh Edgeworth bahwa prinsip utama ekonomi adalah setiap orang digerakkan hanya oleh kepentingan diri. Menurut Sen, dalam bertindak seseorang bisa saja tidak berfokus untuk mengejar kepentingan yang lebih besar untuk dirinya. Sen mengemukakan contoh tindakan patriotisme dan solidaritas, baginya dalam tindakan ini seseorang tidak sedang memaksimalkan kepentingan atau keuntungan yang dapat diraih. Yang terjadi dalam tindakan ini adalah si pelaku melakukan hal itu karena tanggung jawab, meskipun ia sendiri tidak menyukainya atau tidak mendapatkan keuntungan pribadi dari tindakan itu. Dengan kata lain, Sen ingin memastikan bahwa tindakan manusia juga dapat didorong oleh komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban. Maka dari itu Sen menamakan tindakan ini sebagai tindakan kepelakuan yang didorong oleh komitmen (Priyono, 2015).

Secara teoritis, konsep komitmen adalah kritik Sen yang ditujukan pada teori pilihan rasional yang memahami pilihan rasional sebagai maksimalisasi kepentingan diri. Dalam perspektifnya, pilihan rasional tentu bukan hanya pilihan yang didorong oleh motif kepentingan atau keuntungan personal. Dalam pandangannya, tindakan yang didorong oleh komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab atau tindakan

yang tidak sama sekali didorong oleh motif maksimalisasi diri juga merupakan bagian dari pilihan rasional sejauh pilihan tersebut sudah melewati serangkaian pemeriksaan secara kritis. Oleh karena itu, ia lebih memahami pilihan rasional sebagai sikap memeriksa secara kritis (*critical scrutiny*). Oleh Priyono (2015) konsep komitmen diletakkan sebagai sumbangan besar Sen bagi konsepsi rasionalitas. Secara sederhana definisi konsep komitmen tergambar dalam ilustrasi Sen sebagaimana dinukil oleh Priyono (2015: 53), jika seseorang mengalami penyiksaan yang tidak berdampak langsung pada diri saya secara pribadi (misalnya: saya tidak dirugikan secara langsung), tetapi saya merasa bahwa penyiksaan tersebut salah dan saya berkomitmen untuk berusaha menghentikannya, maka itu merupakan pengertian dari komitmen.

Implementasi dan implikasi

Pada intinya, pembangunan oleh Amartya Sen dipandang sebagai proses ekspansi kapabilitas dan emansipasi dari kebutuhan-kebutuhan yang membatasi perwujudan penuh kebebasan manusia. Menurut Sen, kebebasan memiliki elemen dasar yang disebut kapabilitas atau kemampuan seseorang, baik kemampuan dalam bentuk potensi menjadi seseorang (*beings*) maupun kemampuan untuk melakukan suatu tindakan (*doings*). Kedua kapabilitas ini dipandang berharga untuk mencapai aneka bentuk pencapaian aktual dalam hidup seseorang, yang disebut sebagai *functionings*. Sehingga, pembangunan harus ditujukan sebagai peningkatan kapabilitas manusia agar tercapai perluasan pilihan yang pada akhirnya memperluas kebebasan manusia. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan suatu instrumen, yang dalam istilah Amartya Sen disebut dengan istilah kebebasan instrumental (*instrumental freedom*), yang terdiri dari kebebasan politik, fasilitas ekonomi, kesempatan sosial, jaminan keterbukaan serta jaminan perlindungan.

Ide pembangunan sebagai kebebasan Amartya Sen sebenarnya terefleksikan dalam berbagai instrumen hukum di Indonesia. Kebebasan politik misalnya diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Undang-undang ini memberikan kebebasan politik bagi rakyat Indonesia untuk memilih wakil-wakilnya dalam sistem pemerintahan, yang menjadi bagian integral dari kebebasan politik dalam sebuah negara demokratis. Pemilu merupakan ajang bagi masyarakat untuk mengekspresikan kehendaknya, menentukan arah kebijakan publik dan memastikan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Namun, dalam praktiknya masih terdapat hambatan dan tantangan dalam penyelenggaraan pemilu yang dapat mereduksi kebebasan politik sebagai bagian dari instrumen kebebasan Amartya Sen. Diantara hambatan dan tantangan itu adalah *money politics* dan *cost politics* yang mahal. *Money Politics* atau politik uang itu jelas merusak prinsip kebebasan politik dan menurunkan kualitas demokrasi, karena pada praktiknya menggunakan uang atau barang untuk memengaruhi pilihan pemilih dalam pemilu sehingga pemilih tidak dapat membuat pilihan yang bebas sesuai dengan kehendaknya. Sementara *cost politics* atau ongkos politik yang mahal juga sama merusaknya karena dapat menyebabkan ketimpangan dalam akses calon legislatif atau eksekutif, sehingga hanya kelompok-kelompok tertentu yang memiliki sumber daya finansial yang dapat bersaing dalam pemilu. Hal ini pada gilirannya akan menciptakan ketidaksetaraan dalam representasi politik, karena hanya individu atau partai yang memiliki kekuatan ekonomi yang besar yang dapat memperoleh kesempatan lebih besar untuk terpilih. Dengan demikian, orang-orang dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah dapat terpinggirkan dalam proses politik.

Kebebasan politik itu tentu saja tidak hanya dapat dimaknai sempit sebagai keikutsertaan dalam penyelenggaraan pemilihan umum saja. Lebih jauh dari itu, kebebasan politik juga harus memperhatikan elemen penting lainnya, yakni kebebasan berbicara atau berpendapat serta melindungi setiap ekspresi di muka umum itu sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana diatur dalam pasal 28E UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999. Kebebasan berpendapat merupakan nilai fundamental dalam pembangunan dan kebijakan publik. Secara eksplisit, **implikasi** dari kebebasan ini adalah dapat memberikan ruang untuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik dan pembangunan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan hak-hak masyarakat. Pada gilirannya, hal ini akan menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan demokratis serta dapat melengkapi kebebasan instrumental yang lain, yakni **jaminan keterbukaan** atau transparansi.

Pada kenyataannya, masalah-masalah mutakhir menunjukkan bahwa pembangunan di Indonesia masih jauh dari pengamalan nilai-nilai kebebasan politik. Banyak proyek-proyek infrastruktur negara menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat sekitar, seperti yang terjadi pada konflik Wadas di Jawa Tengah dan Rempang di Batam. Pada dasarnya, kedua konflik ini terjadi karena pemerintah dalam wacana pembangunannya tidak mempertimbangkan atau mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal yang terdampak. Dalam kasus Wadas dan Rempang, masyarakat lokal yang langsung terdampak sering kali tidak diikutsertakan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan tanah, kehidupan, dan kesejahteraan mereka. Kondisi ini diperparah oleh dominasi pemerintah yang memiliki kekuasaan dan sumber daya dengan memaksakan proyek-proyek mereka melalui tindakan intimidatif sehingga tidak memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat lokal untuk berbicara atau bernegosiasi. Dalam kerangka kebebasan instrumental Amartya Sen, kebebasan sosial dan ekonomi menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan. Pembangunan yang tidak memerhatikan aspek sosial dan ekonomi jelas akan mereduksi kebebasan individu, karena mereka kehilangan akses terhadap hak-hak dasar yang seharusnya mereka nikmati, seperti hak atas tanah, mata pencaharian, dan perlindungan dari dampak negatif pembangunan.

Dampak negatif yang ditimbulkan dari proyek-proyek infrastruktur itu dapat diminimalisir jika pemerintah dalam program pembangunannya memerhatikan analisis dampak lingkungan. Dalam banyak kasus, proyek infrastruktur pemerintah dilaksanakan tanpa mempertimbangkan analisis dampak lingkungan (AMDAL). AMDAL menjadi instrumen penting dalam setiap program pembangunan yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengurangi dampak negatif yang diakibatkan oleh proyek-proyek pembangunan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat sekitar. Dalam konteks kebebasan Amartya Sen, pengabaian AMDAL jelas mengurangi kebebasan masyarakat untuk menikmati hidup yang layak dan sehat. Masyarakat berhak untuk dilindungi dari dampak negatif pembangunan yang tidak bertanggung jawab, yang merupakan bagian dari instrumen kebebasan jaminan perlindungan dan mereka juga berhak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan dan kehidupan mereka, yang menjadi bagian instrumen kebebasan **jaminan keterbukaan**. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah sebagai pemegang kuasa atas pembangunan untuk memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan yang diusung, khususnya yang berdampak besar terhadap lingkungan dan sosial, harus disertai dengan AMDAL. Selain itu, proses perancangan AMDAL itu harus transparan, dalam arti harus melibatkan masyarakat lokal yang terdampak. Dengan demikian, akan menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang menghormati kebebasan dan hak-hak masyarakat dalam proses pembangunan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses perubahan yang berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Perubahan itu bisa mencakup berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial sampai dengan lingkungan. Dalam teori pembangunan *mainstream* keberhasilan perubahan kualitas hidup manusia itu diukur dari pertumbuhan ekonomi. Dalam arti ini istilah pembangunan menciptakan paradoks, di satu sisi pembangunan menekankan peningkatan atau perubahan kualitatif, namun di sisi lain proses pembangunan terkadang tidak merata, bermuatan konflik dan selalu disertai dengan konsekuensi beragam. Beragam masalah yang muncul itu memunculkan kekecewaan terhadap pembangunan. Tokoh *developmentalism* seperti Amartya Sen mengonseptualisasikan makna ‘pembangunan’ sebagai upaya untuk meredefinisi konsep pembangunan yang telah menjadi sandaran global. Menurut Amartya Sen, pembangunan adalah perluasan kebebasan manusia yang dapat terwujud melalui lima instrumen kebebasan yang terdiri dari kebebasan politik, fasilitas ekonomi, kesempatan sosial, jaminan keterbukaan serta jaminan perlindungan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Budiman, A. (2000). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- [2] Dianasari, L. E. (2019). Crowd-funding sebagai Upaya Sosial Berbasis Pasar untuk Meningkatkan Kapabilitas Rakyat Kecil di Indonesia. Dalam N. Sunandar, *Menuju Indonesia Sejahtera: Esai-esai Kebebasan Ekonomi* (hal. 57-63). Jakarta: Friedrich Naumann Foundation (FNF) Indonesia.
- [3] Fakih, M. (2002). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [4] Hasan, M., & Azis, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV. Nur Lina.
- [5] Juliawan, B. H. (2012). The Question of Identity in Amartya Sen's Capability Approach. *Diskursus*, 1-19.
- [6] Kurniawan, H., & Mahaganti, J. (2019). Institusi Negara dalam Kebebasan. Dalam d. Adinda Tenriangke Muchtar, *Libertarianisme: Perspektif Kebebasan Atas Kekuasaan dan Kesejahteraan* (hal. 22). Suara Kebebasan.
- [7] Maryolo, A. (2018). Pembangunan Sebagai Kebebasan dan Pencapaian Perubahan Sosial. *Sosiologi Reflektif*, 367-379.
- [8] Pramono, W. D. (2020). *Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Wilayah Dengan Pendekatan Kapabilitas*. Yogyakarta: Deepublish.
- [9] Priyono, B. H. (2015). Amartya Sen Membongkar Rasionalitas. *Diskursus*, 38-79.
- [10] Ruhullessin, M. F. (2023, Agustus 16). *Tertinggi di Era Pemerintahan Jokowi, Ini Anggaran Pembangunan Infrastruktur 2024*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://www.kompas.com/properti/read/2023/08/16/210000921/tertinggi-di-era-pemerintahan-jokowi-ini-anggaran-pembangunan>
- [11] Runesi, W. F. (2022). Membongkar Rasionalitas: Pemikiran Amartya sen tentang Kekuasaan Ekonomi. *Melintas*, 329-351.
- [12] Salim, E. (2010). Paradigma Pemangunan Berkelanjutan. Dalam I. J. Azis, *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim* (hal. 22). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- [13] Sen, A. (2009). *The Idea of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- [14] Sunaryo. (2017). *Etika Berbasis Kebebasan Amartya Sen: Integrasi Kebebasan dalam Pilihan Sosial, Demokrasi dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.